

***QUO VADIS* MASYARAKAT SIPIL: NORMALISASI RELASI NEGARA DALAM IMAJINASI INTELEKTUAL JAWA TIMUR**

Gratia Wing Artha

Universitas Nasional, Jakarta

gratiaartha123@gmail.com

Abstrak

Pasca-reformasi, masyarakat sipil Indonesia menghadapi tantangan demokrasi yang kompleks di tengah pergeseran pola kekuasaan. Penelitian ini bertujuan membedah diskursus peran politik masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi melalui kacamata kelompok intelektual di Surabaya dan Malang. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana Michel Foucault, penelitian ini menggali pandangan para intelektual melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Temuan menunjukkan adanya fragmentasi wacana dalam tiga tipologi: kelompok kritis yang menekankan fungsi kontrol total terhadap negara; kelompok moderat yang mendorong kolaborasi strategis dengan pemerintah; dan kelompok hibrida yang mengusung kerja sama kooperatif namun tetap menjaga jarak kritis. Studi ini menyimpulkan bahwa peran politik masyarakat sipil tidaklah monolitik, melainkan hasil kontestasi pemikiran yang dipengaruhi oleh relasi kuasa antara intelektual dan struktur negara.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil, Intelektual, Analisis Wacana, Demokrasi dan Relasi Kuasa

Abstract

In the post-Reformasi era, Indonesian civil society confronts increasingly complex democratic challenges amidst shifting power dynamics. This research aims to dissect the discourse surrounding the political role of civil society in democratic development through the perspectives of intellectual circles in Surabaya and Malang. Employing a qualitative method rooted in Michel Foucault's discourse analysis, the study explores intellectual viewpoints via in-depth interviews and comprehensive documentary analysis. The findings reveal a fragmentation of discourse into three distinct typologies: critical intellectuals, who emphasize a total oversight function against state power; moderate intellectuals, who advocate for strategic collaboration with the government; and hybrid intellectuals, who promote cooperative engagement while maintaining a rigorous critical distance. This study

concludes that the political role of civil society is far from monolithic; rather, it is the product of intellectual contestation shaped by the intricate power relations between scholars and state structures.

Keywords: Civil Society, Intellectuals, Discourse Analysis, Democracy and Power Relations

Article History: *Received 25 October 2025, Revised: 20 November 2025, Accepted: 01 December 2025, Available online 30 January 2026*

PENDAHULUAN

Transisi politik Indonesia pasca-tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai fajar baru bagi demokratisasi yang menjanjikan keterbukaan negara terhadap aspirasi warga dari seluruh lapisan sosial.¹ Namun, dua dekade setelah reformasi, optimisme tersebut kini berada di persimpangan jalan seiring dengan munculnya pola kekuasaan yang tidak lagi represif secara kasar, melainkan bekerja melalui mekanisme normalisasi yang halus. Sebagaimana ditegaskan oleh Hadiz dan Robison, sisa-sisa kekuatan rezim lama tidak benar-benar hilang, melainkan bermetamorfosis ke dalam struktur politik baru yang justru mengkooptasi elemen-elemen masyarakat sipil.² Tantangan politik kontemporer ini seringkali tampak subtil di permukaan, namun pada hakikatnya mengandung dinamika kekuasaan yang jauh lebih berbahaya karena ia bekerja dalam ruang konsensus yang manipulatif.³ Kegagalan dalam merumuskan pedoman peran politik masyarakat sipil yang otonom menjadi indikasi awal bahwa imajinasi intelektual kita mulai terperangkap dalam logika negara.

Di tengah ketidakpastian ini, konsep masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia terus mengalami perdebatan diskursif yang tajam, terutama dalam upaya menyelaraskannya dengan konsep "masyarakat madani" yang lebih bernuansa kultural. Secara sosiologis, masyarakat sipil seharusnya

¹ Vedi R Hadiz, "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-institutionalist Perspectives," *Development and Change* 35, no. 4 (2004): 697–718.

² Vedi Hadiz et al., *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (Routledge, 2004).

³ Edward Aspinall, "Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism," *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* 153180 (2012).

memiliki landasan yang kokoh sebagai perwujudan kekuatan kolektif warga yang mandiri dan berjarak dari otoritas negara. Namun, trauma historis masa Orde Baru yang menghancurkan sendi-sendi kekuatan ini telah bertransformasi menjadi tantangan baru berupa regresi demokrasi yang kian menguat.⁴ Upaya memulihkan kedaulatan sipil kini terjebak dalam fenomena penyempitan ruang sipil yang dipicu oleh ekonomi politik yang tidak memihak pada gerakan akar rumput.⁵ Ketidakmampuan para aktor kunci dalam mendorong transformasi menuju sistem yang adil sering kali berakhir pada kooptasi oleh kekuatan oligarki yang mereorganisasi kekuasaan pasca-reformasi.⁶ Fenomena ini diperparah oleh praktik klientelisme yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan agenda elit.⁷ Akibatnya, reformasi yang diharapkan menjadi jalan menuju otonomi justru dipandang sebagai jembatan menuju integrasi dengan elit politik, yang dalam diskursus iliberalisme kontemporer, semakin memfragmentasi solidaritas masyarakat sipil itu sendiri.⁸

Ketimpangan antara pertumbuhan institusi demokrasi formal dan realitas peran strategis masyarakat sipil menciptakan jurang pemisah yang menghambat terciptanya pluralisme sejati. Kondisi ini diperparah oleh munculnya normalisasi relasi antara negara dan aktor sipil, di mana kolaborasi seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan rasional demi stabilitas. Masyarakat sipil, yang seharusnya menjadi penyeimbang, kini terjebak dalam pragmatisme politik yang melunturkan daya kritis mereka hingga ke titik terendah. Tanpa adanya konsolidasi yang ideologis di tingkat intelektual, gerakan sipil hanya akan menjadi aksesoris bagi demokrasi prosedural yang dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Oleh

⁴ Marcus Mietzner, "Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials," in *Democratic Regressions in Asia* (Routledge, 2022).

⁵ Justito Adiprasetyo et al., "Shrinking Civic Space and the Media: How Indonesian Media Frame Environmental Issues," *Journal of Civil Society* 20, no. 3 (2024): 249–68.

⁶ Thomas Power and Eve Warburton, *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020).

⁷ Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Cornell University Press, 2019).

⁸ Mikaela Nyman, *Democratising Indonesia: The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi*, vol. 49 (Nias Press, 2006).

karena itu, penelitian ini berupaya membedah bagaimana imajinasi intelektual daerah merespons tekanan normalisasi yang kian masif ini.

Dalam lanskap produksi pengetahuan tersebut, kelompok intelektual memegang posisi sentral sebagai penjaga gawang moral yang seharusnya mencegah terjadinya kooptasi total terhadap masyarakat sipil. Secara etimologis, intelektual sebagai pemilik *intellego* merujuk pada individu yang mampu memusatkan perhatian pada persoalan fundamental melalui kekuatan nalar yang independen.⁹ Kelompok ini memikul tanggung jawab besar untuk mendefinisikan batas-batas yang jelas antara kepentingan publik dan syahwat kekuasaan negara. Namun, peran ideal ini kini sedang diuji oleh godaan teknokrasi yang menjanjikan pengaruh instan bagi mereka yang bersedia merapat ke pusat kekuasaan. Fragmentasi pandangan intelektual Jawa Timur mencerminkan sebuah kegamangan ideologis dalam menentukan arah masyarakat sipil di tengah gempuran kepentingan politik praktis.

Realitas pasca-reformasi menunjukkan sebuah fenomena ironis di mana otonomi berpikir kritis kaum intelektual mulai tergerus oleh normalisasi relasi dengan struktur kekuasaan. Sebagian intelektual justru bertransformasi menjadi legitimator kebijakan rezim, menggunakan narasi "pembangunan" dan "stabilitas" untuk membenarkan pemudaran fungsi kontrol sipil. Kondisi politik di Indonesia memperlihatkan bahwa ruang akademik tidak jarang dijadikan alat pembenaran bagi tindakan negara yang bersifat intervensionis namun dikemas dengan bahasa partisipasi.¹⁰ Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai krisis otonomi, di mana intelektual tidak lagi berdiri di luar sistem untuk memberikan kritik, melainkan berada di dalam sistem untuk memberikan pembenaran. Tanpa daya kritis yang otonom, intelektual berisiko kehilangan marwahnya sebagai pilar utama kedaulatan warga.

Intelektual sejatinya memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga masyarakat sipil agar tidak larut dalam pusaran kepentingan negara yang

⁹ Syed Hussein Alatas, *Intelektual Masyarakat Berkembang*, 1988.

¹⁰ Edward Aspinall, "Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough," *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*, 2004, 61–96.

bersifat eksploitatif. Namun, fungsi ini dapat memudar secara drastis jika kaum intelektual lebih memilih untuk menjadi *penyambung lidah* penguasa dengan imbalan posisi atau akses sumber daya.¹¹ Kehilangan otonomi ini berdampak langsung pada kualitas diskursus demokrasi yang dilemparkan ke ruang publik, yang kini cenderung didominasi oleh bahasa harmoni yang semu. Fragmentasi pemikiran di kalangan intelektual mengenai peran masyarakat sipil mencerminkan persimpangan jalan antara kesetiaan pada nilai demokrasi atau penyerahan diri pada pragmatisme. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk melacak sejauh mana "normalisasi" tersebut telah merasuk ke dalam alam pikiran para pemikir di pusat-pusat pendidikan tinggi.

Untuk membedah kompleksitas tersebut, penelitian ini mengadopsi analisis wacana Michel Foucault yang memandang diskursus sebagai medan kontestasi relasi kuasa. Foucault (2012) memandang diskursus sebagai praktik teratur yang tidak hanya memproduksi kata-kata, tetapi juga memproduksi subjek dan kebenaran yang mendukung bekerjanya kekuasaan.¹² Dalam konteks Jawa Timur, wacana yang diproduksi oleh intelektual mengenai masyarakat sipil adalah wujud dari operasi kekuasaan yang mencoba mendefinisikan apa yang dianggap "normal" dan "menyimpang" dalam berdemokrasi.¹³ Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana pengetahuan digunakan sebagai instrumen untuk menormalisasi relasi yang sebenarnya bersifat timpang antara negara dan warga. Analisis ini melampaui sekadar studi pendapat, melainkan sebuah penggalian terhadap akar-akar hegemonik dalam pemikiran intelektual lokal.

Analisis wacana Foucaultian memungkinkan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana 'rezim kebenaran' tentang kolaborasi negara-sipil dikonstruksi secara sistematis. Wacana tidak pernah bersifat netral; ia selalu membawa beban kepentingan yang tersembunyi di balik argumentasi

¹¹ Bertrand Russell, "The Role of the Intellectual in the Modern World," *American Journal of Sociology* 44, no. 4 (1939): 491–98.

¹² Michel Foucault, *Archaeology of Knowledge* (routledge, 2013).

¹³ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 82–107.

ilmiah yang tampaknya objektif.¹⁴ Dengan membedah praktik diskursif intelektual, kita dapat menemukan pola-pola normalisasi yang membuat masyarakat sipil kehilangan daya tawarnya secara perlahan namun pasti. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengidentifikasi bagaimana ideologi-ideologi tertentu masuk ke dalam kebijakan melalui pintu belakang produksi pengetahuan akademik. Oleh karena itu, meneliti diskursus intelektual berarti melakukan interogasi terhadap masa depan demokrasi itu sendiri.

Secara spesifik, studi ini mengambil lokus pada kelompok intelektual di Jawa Timur, dengan fokus utama di Kota Surabaya dan Malang sebagai dua episentrum pendidikan yang sangat mapan. Surabaya dan Malang memiliki dinamika intelektual yang unik, di mana tradisi perlawanan seringkali bergesekan dengan tradisi teknokrasi yang kuat di universitas-universitas besar. Kedua kota ini menjadi cerminan dari persimpangan jalan yang dihadapi oleh gerakan sipil Indonesia: apakah akan tetap konsisten sebagai kekuatan pengontrol atau meluruh dalam normalisasi relasi dengan negara. Kapabilitas intelektual di wilayah ini dalam memengaruhi kebijakan regional menjadikan mereka subjek yang sangat representatif untuk memotret pergeseran imajinasi politik di luar Jakarta. Keunikan lokalitas inilah yang memberikan dimensi baru dalam memahami bagaimana normalisasi kekuasaan bekerja di tingkat sub-nasional.

Pemilihan Surabaya dan Malang didasarkan pada posisi keduanya sebagai laboratorium pemikiran yang secara historis memiliki pengaruh besar terhadap arah gerakan mahasiswa dan intelektual nasional. Sebagai kota dengan basis pendidikan tinggi yang solid, Surabaya dan Malang mampu memproduksi beragam wacana yang kemudian menjadi pedoman bagi aktor-aktor politik lokal. Namun, pengamatan awal menunjukkan adanya kecenderungan kuat ke arah moderasi dan hibriditas pandangan yang mengindikasikan mulai diterimanya normalisasi relasi negara. Di kedua kota inilah, kontestasi antara keinginan untuk tetap kritis dan desakan untuk menjadi bagian dari solusi pemerintah terlihat sangat nyata. Dengan demikian, meneliti dinamika di kedua lokus ini akan memberikan gambaran

¹⁴ Alfathri Adlin, "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan,(Rezim) Kebenaran, Parrhesia," *Jaqqi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 1 (2016): 13–26.

tentang bagaimana "imajinasi" intelektual dibentuk oleh struktur kekuasaan lokal.

Penelitian ini memetakan fragmentasi diskursus tersebut ke dalam tiga tipologi utama yang sangat kontras: intelektual kritis, moderat, dan hibrida. Kelompok kritis mewakili imajinasi masyarakat sipil yang tetap berdiri di luar pagar kekuasaan, sementara kelompok moderat telah menginternalisasi normalisasi relasi sebagai sebuah keniscayaan politik. Di antara keduanya, muncul kelompok hibrida yang mencoba bermain di dua kaki, sebuah posisi yang seringkali justru mempercepat proses kooptasi karena ketidakjelasan garis demarkasi kritik. Tipologisasi ini menjadi kunci untuk memahami mengapa masyarakat sipil di Indonesia saat ini tampak kehilangan arah dan terjebak dalam persimpangan jalan yang membingungkan. Pemetaan ini bukan sekadar klasifikasi akademik, melainkan sebuah kritik terhadap mulai tumpulnya pedang intelektual di Jawa Timur.

Normalisasi relasi negara dalam imajinasi intelektual Jawa Timur adalah tantangan eksistensial bagi masa depan demokrasi. Melalui analisis wacana Foucaultian, penelitian ini berupaya membongkar bagaimana kekuasaan bekerja untuk menumpulkan daya kritis masyarakat sipil melalui peran para intelektualnya. Dengan mengangkat lokus Surabaya dan Malang, tulisan ini menawarkan perspektif segar yang menantang kemapanan teori-teori demokrasi yang seringkali terlalu normatif dan mengabaikan realitas kuasa di tingkat lokal. Artikel ini pada akhirnya merupakan sebuah ajakan untuk mengevaluasi kembali posisi masyarakat sipil agar tidak sekadar menjadi pelengkap dalam skenario kekuasaan, melainkan kembali menjadi subjek yang otonom dan merdeka.

METODE

Penelitian ini mengadopsi analisis wacana sebagai kerangka pendekatan utama untuk membedah konstruksi peran politik masyarakat sipil dalam imajinasi intelektual di Jawa Timur. Pilihan ini didasarkan pada argumen bahwa wacana politik bukanlah entitas otonom yang steril, melainkan sebuah praktik sosial yang terikat erat pada subjek penyampainya dan kondisi historis-sosiologis yang melatarbelakanginya.

Peneliti menggunakan pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan analisis mikro yang tajam terhadap pernyataan-pernyataan intelektual yang tersebar di media massa, jurnal ilmiah, maupun naskah pribadi. Wacana dalam studi ini diperlakukan sebagai realitas politik yang riil, di mana setiap pernyataan intelektual dianggap sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang sedang bekerja. Dengan menempatkan wacana sebagai pusat analisis, penelitian ini mampu membongkar bagaimana pengetahuan diproduksi untuk menjustifikasi posisi politik tertentu di hadapan negara.

Teknis pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan memanfaatkan pedoman wawancara yang terstruktur namun tetap fleksibel. Penggunaan pertanyaan terbuka menjadi instrumen krusial untuk menggali lapisan pendapat, pengetahuan, dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif. Pedoman wawancara berfungsi sebagai kompas metodologis agar diskusi tetap koheren pada topik peran masyarakat sipil tanpa membatasi spontanitas intelektual informan. Peneliti memiliki keleluasaan untuk melakukan improvisasi pertanyaan guna mengeksplorasi nuansa pemikiran yang mungkin tidak terduga di awal proses interaksi. Data yang dihasilkan dari teknik ini tidak hanya berupa teks lisan, tetapi juga mencerminkan posisi ideologis subjek terhadap dinamika demokrasi pasca-reformasi. Melalui interaksi dialektis ini, peneliti berhasil mengumpulkan data kualitatif yang kaya akan substansi pemikiran kritis mengenai relasi negara-sipil.¹⁵

Sebagai pelengkap wawancara, teknik observasi lapangan diterapkan secara simultan untuk menangkap gambaran perilaku, tindakan, dan interaksi sosial subjek penelitian secara langsung. Observasi ini tidak sekadar menjadi aktivitas pelengkap, melainkan metode untuk memvalidasi dan memahami aspek-aspek tersembunyi yang seringkali luput atau sengaja tidak diungkapkan secara lisan. Peneliti melakukan pengamatan detail terhadap setting sosial dan perilaku non-verbal informan guna menangkap keresahan atau pemikiran yang bersifat sensitif dan tidak disampaikan di ruang publik. Seringkali, ideologi terdalem seorang intelektual justru terungkap melalui isyarat atau pernyataan informal saat peneliti berada dalam situasi yang lebih privat dengan subjek. Melalui keterlibatan

¹⁵ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik* (Prenada Media, 2016).

langsung di lapangan, peneliti mampu mengidentifikasi adanya diskrepansi antara wacana formal dan keyakinan substantif dari para informan. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kedalaman empiris yang kuat serta mampu merepresentasikan realitas psikopolitik subjek secara akurat.¹⁶

Penelitian ini menggunakan studi dokumen untuk memperkuat triangulasi data dan memperluas cakupan analisis wacana. Dokumen yang dikumpulkan meliputi artikel surat kabar, buku-buku kunci, hingga naskah pribadi yang memuat traktat pemikiran para intelektual Surabaya dan Malang. Integrasi antara dokumen resmi dan dokumen pribadi ini sangat penting untuk melihat konsistensi narasi intelektual dalam berbagai medium ekspresi yang berbeda. Dokumen berperan sebagai artefak intelektual yang memberikan konteks historis sekaligus memperlihatkan bagaimana wacana tersebut berevolusi dari waktu ke waktu. Analisis terhadap dokumen ini memungkinkan peneliti untuk melacak operasi wacana pada level tekstual yang lebih formal dibandingkan data hasil wawancara. Dengan menggabungkan tiga teknik pengumpulan data ini, penelitian berhasil menciptakan korpus data yang solid untuk mendukung klaim-klaim teoretis mengenai normalisasi relasi negara di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Oposisional: Intelektual Kritis dan Dekonstruksi Kegagalan Demokrasi

Kubu intelektual kritis di Jawa Timur membangun narasi utama bahwa masyarakat sipil Indonesia saat ini berada dalam kondisi ‘mati suri’ atau gagal memenuhi mandat historisnya pasca-reformasi. Paradigma yang mereka usung berpijak pada kecurigaan bahwa ruang publik yang tersedia saat ini hanyalah konsesi semu dari negara yang sebenarnya kian hegemonik. Dalam pandangan ini, peran politik masyarakat sipil tidak lagi berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan, melainkan sekadar ornamen pelengkap untuk melegitimasi prosedur demokrasi formal. Kegagalan ini dilihat sebagai konsekuensi logis dari ketidaksediaan negara untuk

¹⁶ M Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media* 61 (2012): 177–81.

melepaskan kontrol birokratisnya yang bersifat semi-otoriter. Oleh karena itu, bagi kelompok kritis, mendiagnosis kegagalan adalah langkah awal yang fundamental untuk merebut kembali kedaulatan warga yang terkooptasi.

Ketajaman kritik kelompok ini berakar pada pengamatan terhadap struktur kekuasaan pemerintah yang dianggap terlalu dominan dan sentralistik. Mereka berargumen bahwa kekuatan negara telah melampaui batas-batas konstitusionalnya melalui regulasi yang mempersempit ruang gerak organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Jawa Timur, informan kritis menyoroti bagaimana kebijakan lokal seringkali dipaksakan tanpa partisipasi publik yang bermakna, melainkan hanya melalui mobilisasi dukungan. Dominasi negara yang bersifat mutlak ini menyebabkan masyarakat sipil kehilangan daya tawar dan hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan strategis. Bagi mereka, kondisi ini adalah bukti nyata bahwa cita-cita reformasi telah dikhianati oleh elit yang haus kekuasaan.

Kubu ini menggunakan analisis wacana untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan negara bekerja melalui normalisasi kepatuhan di kalangan warga. Sesuai dengan konsep Foucault mengenai relasi kuasa, kelompok intelektual kritis memandang bahwa kekuasaan tidak bersifat tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai hubungan kekuatan yang imanen.¹⁷ Mereka melihat adanya "pertarungan kekuatan" yang tidak seimbang, di mana negara menggunakan perangkat pengetahuannya untuk mendisiplinkan masyarakat. Tanpa adanya resistensi yang terorganisir, masyarakat sipil akan terus berada di bawah bayang-bayang hegemoni negara yang kian canggih. Oleh karena itu, wacana yang mereka produksi adalah bentuk perlawanan terhadap rezim kebenaran yang diproduksi oleh penguasa.

Salah satu poin krusial dalam wacana kritis ini adalah identifikasi terhadap tekanan birokratisasi yang mencengkeram semua sendi sosial dan politik. Birokratisasi yang semi-otoriter ini dianggap sebagai warisan Orde Baru yang belum sepenuhnya luruh dan justru menemukan bentuk barunya

¹⁷ Michel Foucault, "The History of Sexuality," *New York: Vintage*, 1990.

di era demokrasi.¹⁸ Fenomena ini menyebabkan peran masyarakat sipil kian surut karena setiap tindakan kolektif harus melalui restu birokrasi yang berbelit dan penuh kepentingan. Kondisi birokratis yang kencang ini menciptakan rasa apatis di kalangan warga, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Bagi intelektual kritis, birokrasi bukan sekadar alat administrasi, melainkan instrumen kekuasaan untuk menjinakkan potensi gerakan rakyat.

Menanggapi kemacetan demokrasi tersebut, kubu intelektual kritis di Surabaya dan Malang mewacanakan pentingnya "gerakan revolusi" sebagai satu-satunya jalan keluar. Revolusi yang dimaksud bukanlah sekadar pergantian kepemimpinan fisik, melainkan revolusi kesadaran dan struktur untuk membangkitkan kembali peran politik warga.¹⁹ Mereka menyerukan perlunya dekonstruksi total terhadap relasi negara-sipil yang selama ini dianggap normal namun sebenarnya eksploitatif. Gerakan ini harus dimulai dari kalangan intelektual yang memiliki keberanian untuk berdiri di luar lingkaran kekuasaan. Tanpa adanya dorongan radikal semacam ini, mereka memprediksi bahwa demokrasi Indonesia akan terus merosot ke arah otokrasi yang terselubung.

Komitmen intelektual dalam kubu ini sangat tinggi untuk menjadikan diri mereka sebagai pelopor pendidikan politik bagi masyarakat bawah. Mereka berpendapat bahwa perjuangan membangun demokrasi yang dilakukan dengan darah dan air mata pada 1998 tidak boleh dibiarkan pudar oleh pragmatisme elit. Pendidikan politik harus difokuskan pada upaya menyadarkan masyarakat akan hak-hak sipilnya yang seringkali diabaikan oleh negara. Intelektual berperan sebagai penyambung lidah bagi mereka yang terbungkam oleh sistem birokrasi yang represif. Melalui pendidikan politik yang kritis, masyarakat sipil diharapkan mampu membentuk barisan yang solid untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Namun, kubu kritis juga menyadari bahwa tantangan terbesar mereka adalah menghadapi apatisme publik yang kian meluas akibat kegagalan sistemik. Wacana yang mereka usung seringkali dianggap terlalu "keras"

¹⁸ *Dokumen wawancara*

¹⁹ *Dokumen wawancara*

atau "utopis" oleh kelompok lain, namun mereka tetap konsisten pada jalur oposisional. Mereka berargumen bahwa kebenaran politik seringkali pahit dan membutuhkan konsistensi untuk memperjuangkannya di tengah arus normalisasi. Bagi mereka, menjadi intelektual berarti siap menjadi musuh bagi ketidakadilan yang dipraktikkan oleh negara.²⁰ Keberadaan wacana kritis ini menjadi sangat vital agar diskursus demokrasi tidak hanya didominasi oleh narasi-narasi harmoni semu yang menyesatkan.

Wacana intelektual kritis di Jawa Timur mencerminkan sebuah kegelisahan mendalam akan masa depan kedaulatan rakyat. Mereka melihat bahwa masyarakat sipil sedang berada di titik nadir yang membutuhkan intervensi pemikiran yang bersifat transformatif. Dengan menolak normalisasi relasi dengan negara, kelompok ini berusaha menjaga api perlawanan tetap menyala di tengah kegelapan birokrasi. Meskipun posisi mereka seringkali termarginalkan dalam kebijakan publik, pengaruh diskursif mereka tetap menjadi pengingat akan pentingnya otonomi sipil. Pada akhirnya, wacana kritis ini adalah benteng terakhir bagi eksistensi demokrasi substantif di Indonesia.

Wacana Institusional: Intelektual Moderat dan Normalisasi Kolaborasi Strategis

Kubu intelektual moderat di Jawa Timur mengonstruksi wacana yang sangat berbeda, di mana mereka lebih menekankan pada aspek pembangunan kapasitas dibandingkan konfrontasi. Mereka berpandangan bahwa peran politik masyarakat sipil di Indonesia masih berada dalam tahap transisi yang memerlukan bimbingan dan waktu untuk matang secara institusional. Bagi mereka, menyalahkan pemerintah secara membabi buta atas kelemahan demokrasi adalah tindakan yang kurang bijaksana dan tidak berdasar pada realitas historis. Mereka melihat bahwa konsep civil society sendiri adalah barang baru dalam diskursus politik Indonesia yang baru mengemuka di akhir abad ke-19. Oleh sebab itu, normalisasi relasi dengan negara dipandang sebagai langkah evolusioner yang diperlukan untuk memperkuat fondasi sosial-politik warga.

²⁰ *Dokumen wawancara*

Dalam pandangan kelompok moderat, kolaborasi strategis dengan negara bukanlah bentuk kooptasi, melainkan ruang negosiasi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Mereka memandang bahwa negara adalah institusi yang memiliki sumber daya besar yang dapat digunakan untuk mempercepat proses demokratisasi jika dikelola dengan baik. Daripada berdiri di luar sistem dan hanya melempar kritik, intelektual moderat memilih untuk masuk ke dalam ruang-ruang kebijakan guna memberikan masukan teknokratis. Wacana yang mereka bangun adalah wacana harmoni, di mana masyarakat sipil dan negara saling melengkapi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Normalisasi ini dianggap sebagai pilihan yang paling rasional dan minim risiko di tengah kondisi politik Indonesia yang fluktuatif.

Kubu moderat di Surabaya dan Malang seringkali melabeli wacana kelompok kritis sebagai narasi yang terlalu "provokatif" dan mengawang-awang. Mereka berargumen bahwa kritik yang tanpa disertai solusi konkret hanya akan menciptakan kegaduhan politik yang tidak produktif bagi stabilitas nasional. Menurut mereka, intelektual sejati harus mampu membaca realitas sosial-politik secara detail dan menyesuaikan strategi perjuangannya dengan kondisi lapangan.²¹ Menuntut perubahan revolusioner dianggap sebagai langkah yang mengabaikan keselamatan publik dan kemajuan yang telah dicapai selama era reformasi. Oleh karena itu, wacana moderasi ini diposisikan sebagai "jalan tengah" yang dianggap lebih dewasa dalam berpolitik.

Pembangunan masyarakat sipil, menurut kubu moderat, harus dimulai dari penguatan internal melalui literasi demokrasi dan keterlibatan dalam proses-proses formal. Mereka mendorong agar masyarakat sipil berpartisipasi aktif dalam forum-forum seperti Musrenbang atau konsultasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Dengan berpartisipasi secara institusional, masyarakat sipil dianggap dapat belajar bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana cara mempengaruhinya secara legal. Wacana ini sangat menekankan pada pentingnya ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum sebagai dasar bagi masyarakat yang demokratis. Bagi mereka,

²¹ *Dokumen wawancara*

demokrasi yang stabil hanya bisa terwujud jika ada keselarasan antara kehendak rakyat dan kebijakan negara.

Kubu intelektual moderat juga menggunakan kuasa pengetahuan mereka untuk mendefinisikan kembali apa yang disebut sebagai peran politik yang ideal. Pengetahuan yang mereka produksi cenderung bersifat teknis dan pragmatis, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem dari dalam. Sesuai dengan pengamatan Jati, wacana kelompok ini sangat dipengaruhi oleh idealisme tentang stabilitas dan ketertiban sosial.²² Mereka percaya bahwa dengan menjadi mitra yang kredibel bagi negara, masyarakat sipil akan mendapatkan pengakuan yang lebih besar dan pengaruh yang lebih luas. Normalisasi relasi ini adalah bentuk adaptasi terhadap realitas kekuasaan yang tidak mungkin dilawan hanya dengan narasi perlawanan.

Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa kelemahan masyarakat sipil saat ini bukan disebabkan oleh penindasan negara, melainkan oleh kurangnya kesiapan masyarakat itu sendiri.²³ Apatisme warga dilihat sebagai tantangan edukasi yang harus diselesaikan melalui kerjasama antara intelektual, media, dan pemerintah. Kelompok moderat melihat bahwa negara pasca-reformasi telah memberikan ruang yang cukup luas bagi kritik, asalkan disampaikan melalui saluran yang tepat. Oleh karena itu, wacana yang mereka usung berfokus pada bagaimana mengoptimalkan saluran-saluran partisipasi tersebut. Bagi mereka, kunci keberhasilan demokrasi terletak pada kemampuan masyarakat untuk bernegosiasi secara cerdas dengan penguasa.

Intelektual moderat juga menyoroti pentingnya menjaga citra positif masyarakat sipil di mata publik agar tidak dianggap sebagai pengacau stabilitas. Mereka khawatir bahwa gerakan-gerakan radikal justru akan memicu kembalinya represi negara yang lebih keras. Dengan mempromosikan citra masyarakat sipil yang kooperatif dan solutif, mereka berharap dapat membangun kepercayaan publik yang lebih luas. Wacana normalisasi ini dianggap sebagai perisai untuk melindungi

²² Wasisto Raharjo Jati, "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 152–67.

²³ *Dokumen wawancara*

keberlangsungan gerakan sipil dari ancaman pembubaran atau pelarangan oleh negara. Dalam konteks relasi kuasa Foucault, kelompok ini melakukan "pendisiplinan diri" agar tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh rezim kebenaran yang berlaku.

Secara keseluruhan, wacana intelektual moderat di Jawa Timur mencerminkan upaya untuk mencari titik keseimbangan antara aspirasi rakyat dan realitas kekuasaan negara. Mereka melihat bahwa normalisasi relasi adalah strategi bertahan sekaligus berkembang di tengah ekosistem politik yang belum sepenuhnya demokratis. Meskipun sering dikritik sebagai legitimator kebijakan, kelompok ini yakin bahwa peran mereka sangat krusial untuk mencegah terjadinya anarki politik. Melalui pendekatan yang bertahap dan institusional, intelektual moderat berharap dapat mewujudkan masyarakat sipil yang matang dan bijaksana. Bagi mereka, demokrasi adalah proses belajar panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerja sama lintas sektoral.

Wacana Simultan-Hibrid: Mencari Sintesis di Tengah Persimpangan Jalan

Kubu intelektual simultan atau hibrida menempati posisi yang unik di tengah pertarungan wacana antara kelompok kritis dan moderat. Mereka mengusung narasi bahwa peran politik masyarakat sipil harus dijalankan secara ganda: sebagai pengontrol negara yang tajam sekaligus sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Wacana simultan ini menolak dikotomi kaku antara perlawanan dan kolaborasi, melainkan mengusulkan sebuah model hibrida yang fleksibel sesuai kebutuhan konteks. Mereka berargumen bahwa dalam era demokrasi yang kompleks, masyarakat sipil tidak bisa hanya memilih salah satu sisi jika ingin memberikan dampak yang nyata. Bagi kelompok ini, keberhasilan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan intelektual untuk menavigasi dua kaki di persimpangan jalan tersebut.

Dalam imajinasi intelektual hibrida, negara tetap memiliki kewajiban moral untuk ikut serta membina dan memfasilitasi pertumbuhan masyarakat sipil. Namun, pembinaan tersebut tidak boleh berujung pada penjinakan atau penghilangan daya kritis warga terhadap kebijakan publik yang menyimpang. Mereka memandang bahwa masyarakat sipil yang ideal

adalah masyarakat yang berdikari secara pemikiran namun tetap mampu berkomunikasi secara konstruktif dengan struktur kekuasaan. Wacana ini mencoba mensintesis semangat revolusioner kubu kritis dengan kearifan pragmatis kubu moderat. Normalisasi yang mereka usung adalah normalisasi yang bersyarat, di mana relasi dengan negara hanya dijalankan sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip dasar kedaulatan warga.

Kelompok simultan di Surabaya dan Malang menekankan bahwa keterbukaan negara terhadap kritik adalah prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat sipil yang sehat. Mereka mendesak agar pemerintah tidak hanya membuka akses formal, tetapi juga benar-benar mendengarkan substansi keberatan yang diajukan oleh kelompok sipil. Pada saat yang sama, mereka juga menuntut agar masyarakat sipil meningkatkan kualitas kritiknya agar tidak sekadar menjadi teriakan di jalanan, melainkan menjadi argumen yang berbasis data.²⁴ Wacana hibrida ini mempromosikan gagasan tentang "kritik solutif", di mana setiap penolakan terhadap kebijakan negara harus disertai dengan tawaran alternatif yang logis. Dengan cara ini, relasi kuasa antara negara dan sipil diharapkan bergeser dari model dominasi-subordinasi menjadi model dialektika-konstruktif.

Secara teoretis, kubu simultan memahami kekuasaan sebagai medan yang cair di mana pengetahuan dan pengaruh dapat diperebutkan melalui berbagai saluran. Sesuai dengan konsep Haryatmoko (2002), wacana tentang kekuasaan bagi kelompok ini adalah jalan keluar untuk menyeimbangkan beragam kepentingan yang saling bertarung. Mereka melihat bahwa intelektual memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan antara aspirasi akar rumput dan logika birokrasi negara. Posisi 'garis tengah' ini diambil bukan karena ketidaktegasan, melainkan sebagai strategi untuk menjaga agar demokrasi tidak jatuh ke dalam polarisasi yang merusak. Pengetahuan yang mereka produksi bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif bagi semua pemangku kepentingan.

Namun, posisi hibrida ini bukan tanpa tantangan, karena mereka seringkali dicurigai oleh kedua kubu lainnya sebagai pihak yang oportunis. Kubu kritis mungkin melihat mereka sebagai agen normalisasi terselubung,

²⁴ *Dokumentasi wawancara*

sementara kubu moderat mungkin menganggap mereka terlalu tidak stabil karena sewaktu-waktu bisa menjadi sangat vokal. Namun, intelektual simultan berargumen bahwa fleksibilitas inilah yang justru dibutuhkan di masa depan demokrasi Indonesia yang penuh ketidakpastian. Mereka percaya bahwa masyarakat sipil harus memiliki ‘banyak wajah’ untuk menghadapi wajah kekuasaan negara yang juga terus berubah. Dengan tetap menjaga jarak kritis sambil terus melakukan keterlibatan, mereka berharap dapat mencegah terjadinya kooptasi total sekaligus menghindari isolasi politik.

Wacana intelektual simultan juga memberikan perhatian besar pada pentingnya pendidikan politik yang komprehensif bagi warga negara. Pendidikan tersebut mencakup cara melakukan advokasi kebijakan, memahami hukum, sekaligus melatih keberanian untuk bersuara ketika terjadi ketidakadilan. Mereka ingin menciptakan warga negara yang cerdas secara politik (*literasi politik*) sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh janji-janji elit maupun narasi provokatif. Bagi kelompok ini, kekuatan masyarakat sipil terletak pada pengetahuannya yang mendalam tentang hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Intelektual berperan sebagai fasilitator yang menyediakan alat-alat analisis bagi masyarakat untuk memahami posisi mereka dalam struktur kekuasaan.

Di wilayah Jawa Timur, pengaruh kelompok hibrida ini cukup terasa dalam forum-forum diskusi akademik dan kolaborasi antara kampus dengan pemerintah daerah. Mereka seringkali menjadi mediator dalam konflik-konflik agraria atau kebijakan lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal dan otoritas.²⁵ Melalui peran mediasi ini, mereka mencoba membuktikan bahwa kritik yang tajam dan kerja sama teknis bisa berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan. Keberhasilan mereka dalam memediasi kepentingan menunjukkan bahwa imajinasi intelektual tentang normalisasi relasi negara bisa berbentuk sebuah kontrak sosial baru yang lebih adil. Bagi mereka, demokrasi adalah tentang bagaimana mengelola pertarungan kekuatan secara beradab dan produktif.

²⁵ *Catatan Obseervasi*

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, wacana intelektual simultan atau hibrida menawarkan visi masa depan demokrasi yang lebih dinamis di persimpangan jalan. Mereka mengakui adanya tantangan normalisasi kekuasaan, namun mereka memilih untuk meresponsnya dengan kreativitas strategi daripada sekadar penolakan atau penyerahan diri. Dengan menggabungkan elemen kritis dan moderat, mereka berusaha menciptakan model masyarakat sipil yang tangguh dalam prinsip namun luwes dalam tindakan. Wacana ini memberikan harapan bahwa di tengah tekanan birokrasi dan apatisme, masih ada ruang bagi intelektual untuk terus mengawal cita-cita reformasi melalui jalur-jalur yang inovatif. Pada akhirnya, keberagaman wacana ini adalah kekayaan bagi demokrasi Indonesia yang harus terus dipelihara dan dikontestasikan.

PENUTUP

Diskursus mengenai peran politik masyarakat sipil di Jawa Timur tidak lagi bersifat monolitik, melainkan terfragmentasi ke dalam tiga tipologi diskursif yang saling berkontestasi: kritis, moderat, dan hibrida. Fenomena ini menegaskan bahwa pasca-reformasi, tantangan demokrasi tidak lagi bermanifestasi dalam bentuk represi fisik yang tunggal, melainkan melalui mekanisme 'normalisasi' relasi kekuasaan yang sangat halus dan variatif. Kelompok kritis secara konsisten menolak normalisasi ini dan mengidentifikasi birokratisasi sebagai ancaman utama yang melumpuhkan kedaulatan warga secara sistemik. Di sisi lain, kelompok moderat justru melegitimasi kolaborasi dengan negara sebagai jalur evolusioner menuju pendewasaan institusional, sementara kelompok hibrida berupaya menavigasi ruang abu-abu antara otonomi dan integrasi sistemik. Ketiga wacana ini mencerminkan dinamika 'kuasa-pengetahuan' Foucaultian, di mana setiap faksi intelektual membangun *rezim kebenaran* versinya sendiri untuk memengaruhi arah masa depan demokrasi Indonesia.

Secara teoretis, posisi masyarakat sipil Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Normalisasi relasi negara yang muncul dalam imajinasi intelektual moderat dan hibrida mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dari gerakan perlawanan menuju keterlibatan yang lebih teknokratis dan akomodatif. Kondisi ini membawa risiko mudarnya otonomi intelektual jika terjebak dalam pragmatisme

kekuasaan, sebagaimana terlihat dari kecenderungan kooptasi aktor sipil ke dalam struktur birokrasi yang kaku. Namun, keberadaan wacana kritis yang tetap vokal menjadi bukti bahwa api kontrol sosial belum sepenuhnya padam, meskipun harus berhadapan dengan tembok apatisme publik yang kian tebal. Oleh karena itu, revitalisasi komitmen intelektual untuk kembali menjadi pelopor pendidikan politik yang independen menjadi imperatif agar keterbukaan akses pasca-reformasi tidak sekadar menjadi alat bagi elit untuk menjinakkan daya kritis warga.

Fragmentasi wacana ini pada akhirnya menuntut adanya redefinisi strategi bagi gerakan masyarakat sipil di tingkat lokal maupun nasional. Intelektual di pusat-pusat pendidikan seperti Surabaya dan Malang harus mampu melampaui ego sektoral diskursifnya untuk merumuskan kembali garis demarkasi yang jelas antara kolaborasi strategis dan kooptasi ideologis. Pemetaan terhadap lanskap pemikiran politik sub-nasional ini memberikan perspektif alternatif yang selama ini terpinggirkan oleh narasi Jakarta-sentris, sekaligus menawarkan kerangka refleksi bagi para aktor sipil dalam menghadapi wajah kekuasaan yang kian adaptif. Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan masyarakat sipil untuk tetap menjadi entitas yang kritis dan berdikari di tengah gempuran normalisasi relasi negara yang kian hegemonik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetyo, Justito, Detta Rahmawan, Kunto Adi Wibowo, Dzikrifa Ningtyas Aliifa, and Rudi Dwi Hartanto. "Shrinking Civic Space and the Media: How Indonesian Media Frame Environmental Issues." *Journal of Civil Society* 20, no. 3 (2024): 249–68.
- Adlin, Alfathri. "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan,(Rezim) Kebenaran, Parrhesia." *Jaqi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 1 (2016): 13–26.
- Alatas, Syed Hussein. *Intelektual Masyarakat Berkembang*. 1988.
- Aspinall, Edward. "Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism." *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* 153180 (2012).

- Aspinall, Edward. "Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough." *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*, 2004, 61–96.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press, 2019.
- Foucault, Michel. *Archaeology of Knowledge*. Routledge, 2013.
- Foucault, Michel. "The History of Sexuality." *New York: Vintage*, 1990.
- Ghony, M Djunaidi, and Fauzan Almanshur. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media* 61 (2012): 177–81.
- Hadiz, Vedi, Vedi R Hadiz, and Richard Robison. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge, 2004.
- Hadiz, Vedi R. "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-institutionalist Perspectives." *Development and Change* 35, no. 4 (2004): 697–718.
- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Prenada Media, 2016.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 152–67.
- Mietzner, Marcus. "Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials." In *Democratic Regressions in Asia*. Routledge, 2022.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 82–107.
- Nyman, Mikaela. *Democratising Indonesia: The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi*. Vol. 49. Nias Press, 2006.
- Power, Thomas, and Eve Warburton. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020.
- Russell, Bertrand. "The Role of the Intellectual in the Modern World." *American Journal of Sociology* 44, no. 4 (1939): 491–98.